

SINTESIS LINTAS SEKTOR UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN MENGURANGI STUNTING DI NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH KECAMATAN SUTERA PESISIR SELATAN

Fitri Wahyuni^{1(a)}, Rahmadani Yusran^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}fitriwahyuni2001november@gmail.com, ^{b)}yusranrdy@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

12-02-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

Kata Kunci:

Lintas Sektoral, Kebijakan, Ketahanan Pangan, Stunting

Keywords:

Cross-Sectoral, Policy, Food Security, Stunting

Corresponding Author:

yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada sintesis lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi stunting di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada kebijakan ketahanan pangan keluarga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2019 tentang ketahanan pangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong peran lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dalam pencegahan stunting adalah dengan adanya tupoksi yang jelas dari dinas terkait dan adanya regulasi ketahanan pangan berupa Perda No. 1 Tahun 2019, yang mendukung sinergi lintas sektor. Namun, peran lintas sektor dalam ketahanan pangan keluarga juga mengalami hambatan yaitu rendahnya kemampuan diversifikasi pangan, kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam pengawasan dan evaluasi program, koordinasi yang belum efektif, serta terbatasnya alokasi anggaran. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang fleksibel terhadap kebutuhan dan karakteristik tiap daerah guna mencapai hasil optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan serta mencegah stunting.

ABSTRACT

This study focuses on cross-sectoral synthesis to improve food security and reduce stunting in Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Sutera District, Pesisir Selatan Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with interviews and documentation as a means of data collection. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study refers to the family food security policy stated in the Pesisir Selatan Regency Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning food security. The research findings show that the driving factors for the role of cross-sectors in supporting family food security in preventing stunting are the existence of clear duties and functions from related agencies and the existence of food security regulations in the form of Regional Regulation No. 1 of 2019, which supports cross-sectoral synergy. However, the role of cross-sectors in family food security also experiences obstacles, namely low food diversification capabilities, lack of cross-sectoral involvement in program supervision and evaluation, ineffective coordination, and limited budget allocation. Therefore, a flexible approach is needed to the needs and characteristics of each region in order to achieve optimal results in realizing sustainable family food security and preventing stunting.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1188>

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah adalah bagaimana mengoptimalkan kerja sama lintas sektoral untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting. Sintesis lintas sektoral dalam kebijakan ketahanan pangan keluarga sangat penting untuk mencegah stunting, karena mengintegrasikan berbagai sektor untuk mengatasi sifat kerawanan pangan yang beragam dan dampaknya terhadap gizi anak. Misalnya, di negara-negara seperti Senegal dan Ethiopia telah menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif dapat menyebabkan pengurangan stunting yang signifikan melalui upaya terkoordinasi (Yearwood dkk., 2023). Mengintegrasikan sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan sangat penting; misalnya, pertanian keluarga dan pendidikan perempuan secara langsung mempengaruhi gizi anak (Del Carmen Casanovas dkk., 2013). Akses ke pendidikan kesehatan dan gizi yang memadai juga sangat penting. Program yang mendidik keluarga tentang pilihan dan praktik makanan bergizi dapat secara signifikan mengurangi tingkat stunting (Putra dkk., 2023), serta upaya terkoordinasi lintas sektor untuk mengatasi penyebab stunting yang mendasari, seperti akses yang tidak memadai ke makanan dan perawatan Kesehatan (Skoufias dkk., 2021). Integrasi berbagai sektor ini menjadi kunci dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting yang efektif.

Sintesis lintas aktor dalam kebijakan peningkatan ketahanan pangan keluarga telah diamati oleh berbagai sarjana yang memperlihatkan beberapa aspek. Struktur tata kelola yang efektif sangat penting untuk menerapkan kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan. Negara-negara seperti Senegal dan Ethiopia telah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kuat dapat menyebabkan pengurangan stunting yang signifikan melalui upaya terkoordinasi lintas sektor (Yearwood dkk., 2023). Mendidik keluarga, terutama perempuan, tentang nutrisi dan persiapan makanan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Program pelatihan tentang persiapan makanan bergizi telah berhasil di masyarakat, seperti yang terlihat di Indonesia (Suhartatik dkk., 2024) (Najdah dkk., 2022). Inisiatif seperti *System to Achieve Food Equity* (SAFE) memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk

mengatasi ketidaksetaraan pangan, menunjukkan pentingnya jaringan lokal dalam meningkatkan akses dan distribusi pangan (Schuh dkk., 2024).

Penelitian terbaru semakin menegaskan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan stunting. Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Widyastuti (2023) menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Puskesmas, pemerintah kelurahan, kader kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting. Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan lintas sektor efektif dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mosshananza & Pramazuly (2024), yang mengungkapkan bahwa dukungan sumber daya dan program spesifik dapat menekan prevalensi stunting secara signifikan. Studi ini menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengurangi angka stunting melalui pendekatan organisasi, dukungan sumber daya, dan program-program spesifik. Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam prevalensi stunting berkat implementasi strategi-strategi tersebut. Selain itu, Sumanti (2024) juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan collaborative governance dalam upaya penurunan stunting. Penelitian ini mengevaluasi peran pemerintah sebagai koordinator, fasilitator, dan akselerator dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui pendekatan collaborative governance. Studi ini menyoroti pentingnya evaluasi peran pemangku kepentingan, perluasan kerja sama jaringan, pengembangan strategi inovatif, dan pembangunan saluran komunikasi khusus untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting.

Sintesis lintas sektoral di Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2012. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan pangan, mulai dari tingkat nasional hingga individu, dapat terpenuhi dengan ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pangan tersebut harus aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau, sambil tetap menghormati nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, setiap individu dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kemudian, berdasarkan UU RI No 18 Tahun

2012 tentang pangan dan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, peran lintas sektoral dapat dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan ketahanan pangan keluarga yang ditujukan untuk pencegahan stunting bersifat multidimensi, maka memerlukan sinergitas dan koordinasi yang efektif di antara berbagai sektor terkait.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa mengintegrasikan sektor-sektor kunci seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu mengurangi masalah stunting. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji peran sinergi lintas sektoral dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga untuk mencegah stunting di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, masih terbatas. Selain itu, penelitian yang ada masih berfokus pada kebijakan nasional secara umum tanpa mengkaji secara spesifik bagaimana sinergi lintas sektoral di tingkat nagari atau desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat. Penelitian sebelumnya juga belum secara rinci membahas tantangan implementasi lintas sektoral dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam mengintegrasikan berbagai sektor untuk mencapai tujuan tersebut, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif untuk mengoptimalkan upaya lintas sektoral dalam pencegahan stunting melalui peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Meskipun demikian, ada argumen yang berlawanan mengenai efektivitas pendekatan lintas sektoral dalam upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga untuk mencegah stunting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang tidak tepat dapat menimbulkan tantangan, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga (Febrian & Yusran, 2021), terbatasnya pemahaman lintas sektor, anggaran yang tidak memadai (Daly & Uzunalioglu, 2024), (Hoorbeek dkk., 2024), serta minimnya data akurat dan regulasi terkait informasi gizi dan pangan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kebijakan ketahanan pangan dalam pencegahan stunting. Selain itu,

integrasi sektor-sektor kunci seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan mungkin tidak selalu mudah dilakukan dan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mencapai sinergi yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektoral memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan terkait agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mencegah stunting. Argumentasi lain mengajukan bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada lintas sektoral mungkin dapat mengabaikan kebutuhan spesifik masing-masing sektor dan menciptakan tantangan koordinasi yang lebih rumit, sehingga diperlukan keseimbangan antara integrasi lintas sektoral dan penguatan kapasitas masing-masing sektor. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ketika pendekatan lintas sektoral dilakukan dengan baik, pendekatan ini dapat menjadi sangat efektif dalam mendorong ketahanan pangan keluarga dan pencegahan stunting (Hoorbeek dkk., 2024), (Daly & Uzunalioglu, 2024). Hal ini karena integrasi berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi akar masalah stunting yang kompleks dan multidimensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sintesis lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi stunting di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dilakukan di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih karena wilayah ini telah ditetapkan sebagai lokus prioritas penanganan dan penurunan stunting sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 050/265/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Kecamatan dan Nagari Lokus Prioritas Penanganan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih informan, yakni pihak-pihak yang memiliki relevansi dan keahlian dalam bidang terkait. Kriteria purposive sampling dalam penelitian ini meliputi: Pemangku kebijakan sektor terkait, yaitu Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana, yang memiliki kewenangan dalam kebijakan ketahanan pangan dan penurunan stunting. Kemudian, Aparatur pemerintah lokal, yaitu Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan di tingkat desa. Selanjutnya, Pelaku program dan tenaga kesehatan, yaitu Forum Posyandu dan Kader Pemberi Manfaat, yang memiliki pengalaman langsung dalam program ketahanan pangan dan intervensi gizi. Terakhir, Masyarakat penerima manfaat, yaitu keluarga yang menjadi sasaran program ketahanan pangan dan pencegahan stunting, untuk memperoleh perspektif dari pihak yang terdampak langsung. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 Orang. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan memfokuskan data yang penting dan merangkum data pokok untuk memastikan data yang relevan untuk digunakan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk naratif. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data yang telah dikategorikan. Periode pengumpulan data berlangsung dari 16 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024, dengan wawancara dan dokumentasi dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki perspektif yang berbeda namun relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Keluarga dalam Pencegahan Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lintas sektor telah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai bagian dari pencegahan stunting. Sebagai contoh, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi landasan bagi berbagai sektor untuk bekerja sama dalam meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bergizi secara berkelanjutan. Regulasi ini memberikan arahan strategis bagi pemerintah daerah dan mendorong keterlibatan aktif pemangku

kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga di setiap nagari. Menurut teori kebijakan publik dari Dunn (2018), efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi yang baik, yang melibatkan koordinasi antara berbagai aktor serta sumber daya yang memadai. Koordinasi yang efektif dalam menyediakan pangan, memperluas akses masyarakat ke sumber pangan bergizi, serta mendorong pemanfaatan pangan yang optimal di tingkat rumah tangga, diatur dalam regulasi ini. Dengan adanya regulasi yang terstruktur dan konsisten, upaya pencegahan stunting dapat diperkuat karena keluarga mendapat dukungan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, tupoksi yang jelas bagi dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, serta Dinas Perikanan dan Pangan, menjadi faktor pendukung dalam menjalankan program dan dukungan untuk ketahanan pangan keluarga sebagai bagian dari pencegahan stunting.

Tantangan Peran Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Ketahanan Pangan Keluarga

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya argumen yang berlawanan terkait peran lintas sektor dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun lintas sektor telah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sintesis peran lintas sektoral dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga.

a) Rendahnya Diversifikasi Pangan

Peran lintas sektoral dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga untuk mencegah stunting belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan untuk melakukan diversifikasi ketahanan pangan. Meskipun demikian, diversifikasi ketahanan pangan memiliki berbagai manfaat yang besar. Diversifikasi tidak hanya dapat memperkuat ketahanan pangan itu sendiri, tetapi juga dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan,

kecerdasan, dan produktivitas masyarakat. Diversifikasi ketahanan pangan mengacu pada pengelolaan dan pemanfaatan beragam jenis bahan pangan, baik nabati maupun hewani, secara lebih optimal dan terintegrasi. Dengan meningkatkan kemampuan diversifikasi, upaya lintas sektoral dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga untuk mencegah stunting dapat lebih selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Diversifikasi pangan memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas masyarakat (FAO, 2020). Namun, di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, diversifikasi pangan masih terbatas karena minimnya edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan beragam serta keterbatasan akses terhadap berbagai sumber pangan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Daly & Uzunalioglu (2024), yang menunjukkan bahwa rendahnya diversifikasi pangan di beberapa daerah terkait erat dengan kurangnya program edukasi gizi yang efektif dan aksesibilitas sumber pangan yang terbatas.

b) Kurangnya Koordinasi dan Evaluasi Program

Peran lintas sektoral dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga untuk mencegah stunting belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam mengawasi dan mengevaluasi program ketahanan pangan keluarga. Menurut Hoornbeek et al. (2024), keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh adanya sistem pemantauan yang ketat serta mekanisme evaluasi yang jelas.

Keterlibatan lintas sektor, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program ketahanan pangan keluarga. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara instansi-instansi terkait dalam mengawasi dan mengevaluasi program ini menyebabkan kesulitan dalam memantau kinerja program serta mendeteksi permasalahan yang muncul. Akibatnya, program ketahanan pangan keluarga menjadi kurang efektif dalam mencegah stunting, karena tidak ada proses perbaikan yang sistematis berdasarkan evaluasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan keterlibatan lintas sektor dalam pengawasan

dan evaluasi program ketahanan pangan keluarga agar tujuan pencegahan stunting dapat tercapai secara optimal.

Kemudian, Peran lintas sektoral dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan keluarga dalam pencegahan stunting belum berhasil dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi yang efektif di antara lintas sektor terkait. Koordinasi lintas sektor yang baik dan terstruktur dapat membuat program-program yang dijalankan menjadi lebih sinergis dan efisien dalam mencapai tujuan program. Namun, sayangnya lintas sektor belum mampu untuk saling bekerja sama secara kolaboratif dalam mendukung upaya ketahanan pangan keluarga. Hal ini disebabkan oleh arahan dari kepala daerah yang masih kurang tegas dalam memberikan perintah kepada lintas sektor agar berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung satu sama lain dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut.

c) Terbatasnya Alokasi Anggaran

Permasalahan lain yang dihadapi adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk pembiayaan program peningkatan ketahanan pangan keluarga. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, namun alokasi anggaran untuk pembiayaan program ini masih sangat terbatas. Hal ini juga diamati dalam penelitian Schuh et al. (2024), yang menemukan bahwa daerah dengan keterbatasan anggaran sering kali menghadapi tantangan dalam mendistribusikan bantuan pangan secara merata, menyebabkan ketimpangan akses di berbagai wilayah.

Keterbatasan alokasi anggaran ini menyulitkan upaya lintas sektor dalam mengimplementasikan sejumlah program yang dirancang oleh berbagai lintas sektor tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena implementasi program membutuhkan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelatihan, distribusi bantuan, hingga pelaksanaan program. Anggaran yang tidak mencukupi sering kali menyebabkan banyak kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga pelaksanaannya harus ditunda. Selain itu, keterbatasan dana juga berdampak pada pemberian dukungan berupa bantuan pangan yang tidak bisa dilakukan secara merata kepada

seluruh pihak yang membutuhkan. Hal ini menyebabkan pihak-pihak terkait seperti Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih dan Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan harus melakukan seleksi ketat untuk menentukan prioritas penerima bantuan pangan berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat yang jauh melebihi kapasitas anggaran yang tersedia tetap menjadi kendala yang signifikan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan pencegahan stunting di wilayah tersebut.

Kurangnya anggaran juga membuat bantuan pangan yang diberikan oleh Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih kepada masyarakat yang membutuhkan tidak merata. Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan belum dapat menerima bantuan. Secara keseluruhan, permasalahan ini mempengaruhi berbagai sektor dan aktor yang terlibat, mulai dari dinas pemerintahan hingga kader pemberi manfaat di tingkat nagari. Terbatasnya alokasi dana menyebabkan banyak program yang dirancang tidak dapat dilaksanakan secara optimal, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan harus ditunda atau dilakukan secara bertahap. Hal ini juga berdampak pada distribusi bantuan pangan yang tidak merata, sehingga hanya kelompok prioritas yang dapat menerima dukungan. Situasi ini memaksa pihak-pihak terkait, seperti Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih dan Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan, untuk melakukan seleksi ketat terhadap penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak. Meskipun demikian, tingginya kebutuhan masyarakat yang jauh melampaui kapasitas anggaran yang tersedia tetap menjadi kendala yang signifikan dan perlu penanganan lebih lanjut untuk memastikan pemerataan distribusi bantuan pangan di wilayah tersebut.

d) Infrastruktur dan Aksesibilitas yang Terbatas

Kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi tantangan besar dalam implementasi program ketahanan pangan keluarga. Menurut World Bank (2023), aksesibilitas terhadap pasar dan layanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan keluarga. Di daerah

dengan infrastruktur terbatas, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar menjadi sangat tinggi, meningkatkan risiko ketidakstabilan pangan.

Adanya keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan tantangan utama dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga, terutama di daerah Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih. Nagari ini merupakan daerah yang terpencil dengan kondisi geografis yang sulit, kualitas jalan yang buruk, dan terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menghambat distribusi pangan yang lancar dan terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, akses masyarakat terhadap pasar, layanan kesehatan, dan informasi gizi yang terbatas juga menjadi kendala signifikan. Hal ini berdampak langsung pada upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Akses pasar yang masih terbatas menyebabkan masyarakat bergantung pada akses dari luar, seperti pedagang yang berjualan kebutuhan harian. Kondisi ini membuat masyarakat kekurangan konsumsi pangan pokok yang bergizi dan beragam, terutama saat cuaca tidak mendukung sehingga tidak ada pedagang yang masuk untuk berjualan. Sementara itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan turut berpengaruh pada status gizi keluarga, utamanya pada ibu hamil dan balita. Akibatnya, program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga seringkali sulit diimplementasikan secara optimal, berdampak pada peningkatan prevalensi stunting. Minimnya infrastruktur dan keterbatasan aksesibilitas di beberapa nagari menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah-daerah tersebut. Kesulitan menjangkau wilayah terisolasi juga membatasi kapasitas instansi terkait untuk memberikan dukungan teknis dan pembinaan yang optimal.

Kemudian keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di Nagari Gantiang Mudiak Utara juga menjadi hambatan signifikan bagi pemerintah nagari dalam pelaksanaan berbagai program. Pemerintah nagari pernah memberikan bibit tanaman kepada masyarakat untuk ditanam di pekarangan rumah, namun implementasi program tersebut terhambat karena banyaknya rumah warga yang tidak dilengkapi dengan pagar, sehingga tanaman yang diberikan mudah rusak dan terinjak-injak. Selain itu, saat ini pemerintah nagari sedang

mengembangkan program budidaya itik sebagai salah satu upaya peningkatan ketahanan pangan, namun program ini juga menghadapi permasalahan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan ternak itik mereka dimangsa oleh hewan predator lain, seperti anjing liar atau binatang buas. Hal ini, memperlihatkan adanya kendala dalam pengelolaan peternakan yang optimal di wilayah dengan akses yang terbatas. Kondisi infrastruktur dan aksesibilitas yang sulit di Nagari Gantiang Mudiak Utara telah menghambat berbagai upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui program-program yang telah direncanakan, seperti pembagian bibit tanaman dan pengembangan peternakan itik. Tantangan berupa kerusakan tanaman dan predasi hewan pada itik menunjukkan perlunya upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi kendala infrastruktur dan akses di wilayah tersebut agar program-program terkait ketahanan pangan dapat berjalan dengan lebih efektif.

e) Kurangnya Kemampuan dan Kesadaran Masyarakat

Implementasi peran lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga belum didukung sepenuhnya oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan yang berkelanjutan menjadi faktor penghambat utama dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan dan pola pikir yang sulit diubah, seperti kecenderungan untuk lebih memilih memenuhi kebutuhan pangan secara instan dengan cara membeli, dibandingkan dengan merawat dan mengembangkan sumber pangan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Masih banyak masyarakat yang memilih untuk menjual bantuan pangan yang diberikan sebelum memungkinkan untuk berkembang, sehingga mereka tidak dapat menjadikan bantuan tersebut sebagai modal untuk membangun ketahanan pangan keluarga dalam jangka panjang. Akibatnya, program-program yang seharusnya memberikan dampak positif dalam jangka panjang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat yang seharusnya dari bantuan pangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola

sumber pangan secara berkelanjutan, agar implementasi peran lintas sektor dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi implementasi berbagai program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Nagari Gantiang Mudiak Utara, Surantih. Permasalahan tersebut antara lain: keterbatasan anggaran, infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana peran lintas sektor berkaitan dengan kurangnya koordinasi antarlembaga (Febrian & Yusran, 2021), terbatasnya pemahaman lintas sektor, anggaran yang tidak memadai (Daly & Uzunalioglu, 2024), (Hoornebeek dkk., 2024), serta minimnya data akurat dan regulasi terkait informasi gizi dan pangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan lain yang dihadapi, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan dan program pemerintah secara optimal, serta kurangnya upaya komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber pangan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi hambatan utama dalam implementasi peran lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mencegah stunting di wilayah tersebut.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa aspek peran lintas sektor dalam kebijakan peningkatan ketahanan pangan keluarga telah diamati oleh berbagai sarjana. Beberapa contoh yang dapat dibahas adalah struktur tata kelola yang efektif yang diterapkan dalam kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan, upaya mendidik keluarga, terutama perempuan, tentang nutrisi dan persiapan makanan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, program pelatihan tentang persiapan makanan bergizi (Suhartatik dkk., 2024) (Najdah dkk., 2022), serta inisiatif seperti System to Achieve Food Equity yang memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan pangan. Selain itu, peran jaringan lokal dalam meningkatkan akses dan distribusi pangan (Schuh dkk., 2024) juga menunjukkan adanya kesamaan permasalahan yang dialami dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan

keluarga. Meskipun demikian, penelitian yang mengidentifikasi permasalahan dan tantangan spesifik di suatu daerah tertentu, seperti penelitian ini, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang realitas dan konteks lokal yang penting diperhatikan dalam implementasi program peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa aspek peran lintas sektor dalam kebijakan peningkatan ketahanan pangan keluarga telah diamati oleh berbagai sarjana, ada juga pandangan yang berbeda. Beberapa kritik menyatakan bahwa pendekatan yang disarankan, seperti struktur tata kelola yang efektif, program edukasi gizi untuk keluarga, dan inisiatif berbasis masyarakat, belum tentu berhasil diterapkan secara universal. Selain itu, peran jaringan lokal dalam meningkatkan akses dan distribusi pangan juga dipertanyakan efektivitasnya, terutama dalam konteks daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini sendiri mengidentifikasi permasalahan spesifik di Nagari Gantiang Mudiak Utara, yang menunjukkan bahwa realitas dan konteks lokal memiliki tantangan unik yang perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, implementasi program peningkatan ketahanan pangan keluarga membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan sensitif terhadap kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi stunting di Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya diversifikasi pangan, serta kurangnya koordinasi dan evaluasi program. Analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran lintas sektoral dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan realitas dan konteks lokal secara komprehensif dalam implementasi program peningkatan ketahanan pangan keluarga. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar

sektor, optimalisasi alokasi anggaran, serta penguatan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih baik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program ketahanan pangan di daerah terpencil. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis ke daerah lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Selain itu, implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan teori kebijakan publik dan perubahan perilaku dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga. Dengan pendekatan yang fleksibel dan sensitif terhadap kondisi lokal, diharapkan kebijakan ketahanan pangan dapat lebih efektif dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daly, M., & Uzunalioglu, M. (2024). *Analysing A Selection of Family Policies from the Perspective of Resilience*. SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/tgw2x>
- Del Carmen Casanovas, M., Lutter, C. K., Mangasaryan, N., Mwadime, R., Hajebehoy, N., Aguilar, A. M., Kopp, C., Rico, L., Ibiert, G., Andia, D., & Onyango, A. W. (2013). Multi-sectoral interventions for healthy growth. *Maternal & Child Nutrition*, 9(S2), 46–57. <https://doi.org/10.1111/mcn.12082>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- FAO. (2020). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Ketahanan pangan perkotaan, kemiskinan,

- dan Covid-19: Kasus Kota Bandung Urban Food Security, Poverty, and COVID-19: Case of Bandung City. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 680-699.
- Hoornbeek, J., Chiyaka, E. T., Lanese, B., Vreeland, A., & Filla, J. (2024). Financing community partnerships for health equity: Findings and insights from CROSS-SECTOR professionals. *Health Services Research*, 59(S1), e14237. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.14237>
- Lailiyah, M., & Widyastuti, D. A. (2023). Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tlogosari Kulon. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 624-632.
- Mosshananza, H., & Pramazuly, A. N. (2024). Strategi Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Anak di Desa Kaliasin Kabupaten Lampung Selatan. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 12(1), 30-37.
- Najdah, N., Adam, A., Nurliah, N., & Nurbaya, N. (2022). Sosialisasi Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Mamuju. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 543-549. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i3.1018>
- Pane, S. M. S., & PM, R. K. (2022). Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Rawan Pangan Di Kelurahan Belawan Bahari Kota. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 291-298.
- Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Pratomo, Y. S., & Daenie, M. (2021). Mewujudkan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(2), 95-105.
- Presiden Republik Indonesia, 2012, *Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Putra, D. P., Anita Riantina, Bella Nurindalia, Juniarti, Tharisya Ayu Kirana, Dwi Irma Mayang, Haerawati Idris, Rostika Flora, Misnaniarti, & Hamzah Hasyim. (2023). The Role of Food Security in the Incident of Stunting in Toddlers. *Community Medicine and Education Journal*, 4(3), 367-372. <https://doi.org/10.37275/cmej.v4i3.405>
- Riajaya, H., & Munandar, A. I. (2020). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Meminimalisasi Stunting Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 19(2), 255-274.
- Schuh, A. M., Alexander, C., Gasperetti, K., Gorecki, M. C., Cutler, K., Hoffman, C., Kahn, R. S., Okano, C., & Riley, C. L. (2024). A new approach to a wicked problem: Development of a cross-sector community-centered learning network to tackle childhood food inequity. *Frontiers in Public Health*, 12, 1436760. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1436760>
- Skoufias, E., Vinha, K., & Sato, R. (2021). Reducing Stunting through Multisectoral Efforts in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 30(4), 324-348. <https://doi.org/10.1093/jae/ejaa016>
- Suhartatik, N., Husnun, F., & Puyanda, I. R. (2024). The Importance of Food Security at The Family Level in Preventing Stunting in Indonesia: Pentingnya Ketahanan Pangan di Tingkat Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Indonesia. *JAKADIMAS (Jurnal Karya Pengabdian Masyarakat)*, 2(1), 28-33. <https://doi.org/10.33061/jakadimas.v2i1.10750>
- Sumanti, D. (2024). Analisis Penerapan Collaborative Governance pada Penurunan Stunting di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 10(2), 240-250.

Susilastuti, D., Meri, A., & Marhaeni, L. S. (2021). *Functional Food Support Government Policies to Prevent Stunting*. 1(1).
<https://ahlimediapress.com/prosiding/index.php/icistech/article/view/67>

World Bank. (2023). *Infrastructure and Food Accessibility: Key Determinants of Food Security*. World Bank Publications

Yearwood, J., Akseer, N., Kandru, G., & Bhutta, Z. A. (2023). Food security lessons from exemplars in stunting reduction. Dalam M. Caraher, J. Coveney, & M. Chopra (Ed.), *Handbook of Food Security and Society* (hlm. 183–201). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781800378445.0027>